

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. KONDISI KABUPATEN TASIKMALAYA

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Tasikmalaya secara geografis terletak antara 07°2' 00" - 07°48' 00" Lintang Selatan dan 107°54' 00" - 108°26' 00" Bujur Timur. Sedangkan secara administratif Kabupaten Tasikmalaya berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Tasikmalaya dan Kab. Ciamis.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Garut.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ciamis.

Luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya keseluruhan adalah 2.708,82 km², dengan panjang garis pantai sekitar 54.5 km dan luas fishing ground sebesar 306 km². Secara administratif terdiri dari 39 Kecamatan, 351 desa. Tiga kecamatan mempunyai wilayah pesisir dan lautan dengan luas total 200,72 km² atau 7,41 % dari luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Luas setiap wilayah kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Luas Wilayah Administrasi per Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km²)	%DE
1	Cipatujah	238,95	8,82
2	Karangnunggal	153,73	5,68
3	Cikalong	160,47	5,92
4	Pancatengah	160,73	5,93
5	Cikatomas	144,60	5,34
6	CibalongDD	61,67	2,28
7	Parungponteng	50,72	1,87
8	Bantarkalong	64,77	2,39
9	Bojongasih	49,83	1,84
10	Culamega	86,42	3,19
11	Bojonggambir	133,37	4,92
12	Sodonghilir	97,20	3,59
13	Taraju	64,10	2,37
14	Salawu	74,01	2,73
15	Puspahiang	57,37	2,12
16	Tanjungjaya	37,21	1,37
17	Sukaraja	47,42	1,75
18	Salopa	106,54	3,93
19	Jatiwaras	87,77	3,24
20	Cineam	72,18	2,66
21	Karangjaya	48,09	1,78
22	Manonjaya	42,81	1,58
23	Gunungtanjung	47,77	1,76

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	%DE
24	Singaparna	19,48	0,72
25	Mangunreja	28,08	1,04
26	Sukarame	16,47	0,61
27	Cigalontang	141,56	5,23
28	Leuwisari	30,03	1,11
29	Padakembang	19,92	0,74
30	Sariwangi	40,15	1,48
31	Sukaratu	42,81	1,58
32	Cisayong	50,69	1,87
33	Sukahening	29,45	1,09
34	Rajapolah	15,22	0,56
35	Jamanis	17,52	0,65
36	Ciawi	46,65	1,72
37	Kadipaten	43,18	1,59
38	Pagerageung	63,35	2,34
39	Sukaresik	16,55	0,61
Jumlah		2.708,82	100,00

Sumber: Bappeda Kabupaten Tasikmalaya, 2013.

2. Kondisi Topografis

Wilayah Kabupaten Tasikmalaya memiliki ketinggian berkisar antara 0 – 2.500 meter di atas permukaan laut (dpl). Secara umum wilayah tersebut dapat dibedakan menurut ketinggiannya, yaitu : bagian Utara merupakan wilayah dataran tinggi dan bagian Selatan merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara

0-100 meter dpl. Luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya menurut ketinggian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Luas Wilayah dan Ketinggian di Kabupaten Tasikmalaya

No	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (ha)	KETINGGIAN (mdpl)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Cipatujah	24.666,59	0 – 500
2	Karangnunggal	13.632,86	0 – 400
3	Cikalong	13.966,48	0 – 200
4	Pancatengah	20.184,68	100 – 350
5	Cikatomas	13.268,46	50 – 500
6	Cibalong	5.857,51	100 – 600
7	Parungponteng	4.726,92	150 – 700
8	Bantarkalong	5.983,46	250 – 750
9	Bojongasih	3.858,33	250 - 700
10	Culamega	6.832,34	200 – 750
11	Bojonggambir	16.928,66	100 – 950
12	Sodonghilir	9.310,90	200 – 900
13	Taraju	5.585,17	350 – 1.250
14	Salawu	5.049,20	500 – 1.450
15	Puspahiang	3.489,21	350 – 1.500
16	Tanjungjaya	3.669,12	250 – 600
17	Sukaraja	4.308,06	200 – 550
18	Salopa	12.176,42	200 -1.150
19	Jatiwaras	7.336,59	150 – 600

No	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (ha)	KETINGGIAN (mdpl)
(1)	(2)	(3)	(4)
20	Cineam	7.878,99	100 – 950
21	Karangjaya	4.789,85	150 – 900
22	Manonjaya	3.941,23	200 – 500
23	Gunungtanjung	3.631,16	300 – 1.000
24	Singaparna	2.481,86	400 – 450
25	Mangunreja	2.964,14	400 – 600
26	Sukarame	1.991,91	350 – 450
27	Cigalontang	11.974,43	450 – 2.100
28	Leuwisari	5.325,94	450 – 1.450
29	Padakembang	3.770,37	400- 850
30	Sariwangi	4.965,81	500 – 900
31	Sukaratu	5.714,38	450- 2.200
32	Cisayong	5.940,13	400 – 1.800
33	Sukahening	2.842,14	500 – 1.800
34	Rajapolah	2.145,42	450 – 600
35	Jamanis	2.128,08	450 – 800
36	Ciawi	4.531,28	500 -1.750
37	Kadipaten	4.578,70	600 – 1.550
38	Pagerageung	6.674,41	500 – 1.500
39	Sukaresik	1.780,53	400 – 500

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Tasikmalaya 2012

2. Aspek Demografi

Secara demografis Jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin serta pengelompokan umur berdasarkan usia sekolah merupakan beberapa statistik penting yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan. Hal tersebut berkaitan dengan kepentingan penyusunan perencanaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat serta rencana intervensi program dalam berbagai sektor seperti perencanaan tingkat kebutuhan pangan, kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur wilayah.

Capaian pertumbuhan penduduk Kabupaten Tasikmalaya selama 2 tahun terakhir (tahun 2012-2013) mencapai 1,00 % dari 1.716.178 jiwa pada tahun 2012 menjadi 1.738.011 jiwa pada tahun 2013, sedangkan untuk laju pertumbuhan penduduk tahun 2013 adalah sebesar 1,3%. Jika melihat struktur usia penduduk yang mayoritas usia produktif dan percepatan pembangunan ibukota diperkirakan pertumbuhan penduduk Kabupaten Tasikmalaya akan lebih meningkat, sehubungan dengan pertumbuhan kawasan perkotaan yang menjadi daya tarik terjadinya urbanisasi. Selengkapnya jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya menurut jenis kelamin disajikan pada Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3 Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2013

Tahun	Jumlah Penduduk		Total	Sex Ratio	LPP
	Laki-laki	Perempuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2010	835.052	840.492	1.675.544	99,35	0,88
2011	843.346	849.086	1.692.432	99,32	1,00
2012	855.179	860.999	1.716.178	99,32	1,4
2013	866.058	871.953	1.738.011	99,32	1,3

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya 2013

Dari hasil proyeksi penduduk di Kabupaten Tasikmalaya terlihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013 sebanyak 1.738.011 orang, dengan penduduk laki-laki sebanyak 866.058 orang atau sebesar 49,83 % dan penduduk perempuan sebanyak 871.953 orang atau sebesar 50,17 %. Secara total, sex ratio penduduk Kabupaten Tasikmalaya di tahun 2013 adalah sebesar 99,32 yang artinya jumlah penduduk laki-laki 0,68 persen lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

**Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Per Kelompok Umur Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013**

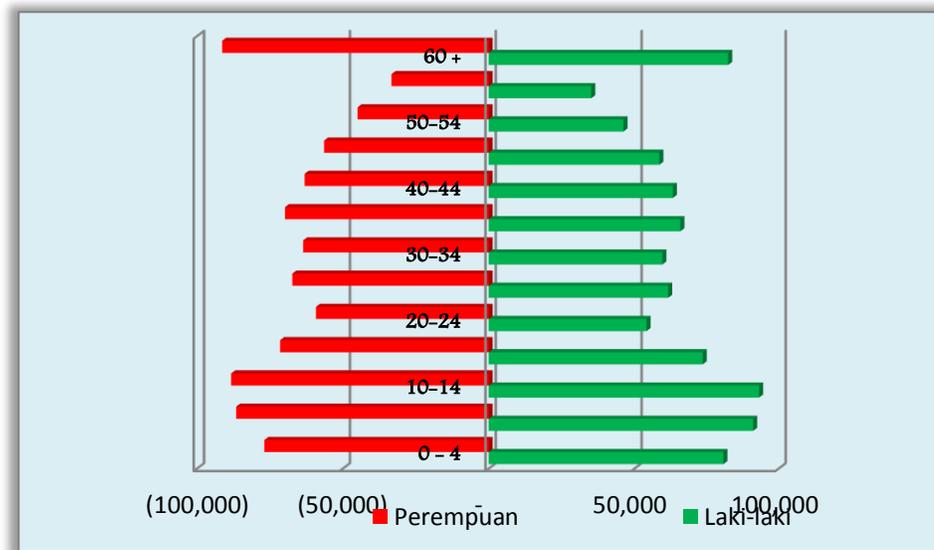
Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0 – 4	80.848	76.852	157.700
5 – 9	91.176	86.541	177.717
10-14	93.231	88.242	181.473
15-19	73.661	71.468	145.129
20-24	54.176	59.192	113.368
25-29	61.665	67.276	128.941
30-34	59.649	63.570	123.219
35-39	65.903	69.777	135.680
40-44	63.292	63.081	126.373
45-49	58.597	56.404	115.001
50-54	46.212	44.929	91.141
55-59	35.163	33.289	68.452
60 +	82.485	91.332	173.817
Jumlah	866.058	871.953	1.738.011

Sumber :BPS Kabupaten Tasikmalaya 2013

Dari gambaran di atas, dapat kita lihat bahwa komposisi penduduk Kabupaten Tasikmalaya merupakan penduduk usia produktif dimana penduduk usia (0-14) tahun sebanyak 29,74 persen, penduduk dengan usia 60 tahun ke atas sebanyak 10 persen dan penduduk usia (15-59) tahun sebanyak 60,26 Persen. Hal ini memberikan indikasi

bahwa permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Tasikmalaya merupakan pekerjaan rumah yang harus mendapat perhatian serius. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya jumlah mereka yang berusia produktif, oleh karena itu upaya-upaya untuk menciptakan lapangan kerja baru harus lebih ditingkatkan.

Gambar 2.1 Piramida Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013 Berdasarkan Hasil Proyeksi



Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya 2013

Selanjutnya penghitungan penduduk usia produktif dan tidak produktif juga erat kaitannya dengan rasio beban ketergantungan (*Burden of Dependency Ratio*). Rasio beban ketergantungan merupakan perbandingan antara penduduk yang berusia 0-14 tahun dan penduduk 65 tahun keatas dengan penduduk yang berusia 15-64 tahun. Dengan demikian rasio ketergantungan pada dasarnya menyatakan berapa banyak

penduduk yang dianggap sebagai tidak/belum produktif dibandingkan dengan penduduk yang berada pada usia produktif.

Hasil proyeksi menunjukkan bahwa rasio ketergantungan anak Kabupaten Tasikmalaya tahun 2013 sebesar 49,35 persen, dan rasio ketergantungan lanjut sebesar 16,60 persen atau secara keseluruhan angka beban ketergantungan Kabupaten Tasikmalaya sebesar 65,95 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa untuk setiap 100 orang usia produktif harus menanggung sebanyak 66 orang yang tidak/belum produktif.

Selanjutnya, Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang dirinci persektor dapat memberikan gambaran yang lebih rinci tentang pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Untuk mengetahui gambaran pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Tasikmalaya dan perbandingannya dengan Propinsi Jawa Barat, dapat melihat tabel bawah ini:

Tabel 2.5. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tasikmalaya dan Provinsi Jawa Barat dirinci menurut sektor

Sektor	Pertumbuhan Ekonomi (%)	
	Kab. Tasikmalaya	Prop. Jawa Barat
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan	-1,16	-0,71
2. Pertambangan dan Penggalian	-3,14	-7,18
3. Industri Pengolahan	9,70	3,94
4. Listrik, Gas dan Air Minum	4,77	7,85
5. Bangunan	4,17	13,61
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	9,81	11,55
7. Pengangkutan dan Komunikasi	1,26	12,00
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa	7,50	10,22
9. Jasa-jasa	8,74	8,14

Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya 2013

Pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi di Kabupaten Tasikmalaya adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan lajunya yang mencapai 9,81 %. Kemudian sektor Industri Pengolahan dengan laju 9,70 %, Jasa-jasa dengan laju 8,74 % dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa dengan nilai 7,50 %. Sedangkan sektor Pertambangan dan Penggalian adalah sektor dengan laju yang paling rendah -3,14 %.

Di tingkat Propinsi Jawa Barat sektor Bangunan lajunya yang paling tinggi yaitu mencapai 13,61 % diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi 12,00 %, lalu sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 11,55 %. Laju ekonomi yang paling rendah ditunjukkan oleh sektor Pertambangan dan Penggalian dengan lajunya sebesar -7,18 %.

Distribusi persentase PDRB sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut di dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Distribusi persentase juga dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor dalam pembentukan PDRB, sehingga akan tampak sektor-sektor yang menjadi motor penggerak pertumbuhan (sektor andalan) di wilayah yang bersangkutan.

Kemudian pada aspek pelayanan umum. Jumlah penduduk yang sedemikian besar dengan struktur umur yang kebanyakan berusia muda, relatif memiliki tanggungjawab besar untuk mengantarkan penduduk muda untuk memperoleh pendidikan yang layak di Kabupaten Tasikmalaya. Selain masalah jumlah penduduk, persebarannya juga menjadi faktor penentu perkembangan pendidikan. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya saat ini masih perlu ditingkatkan dalam upaya menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pelayanan pendidikan tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang dapat dibuktikan dengan kenaikan capaian indikator makro yakni indikator pendidikan dalam

IPM, peningkatan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Pada pelayanan sehari-hari dapat ditunjukkan dengan meningkatnya rasio guru dan peserta didik, peningkatan jumlah rombongan belajar, sarana prasarana, peningkatan kualifikasi pendidik (S1 dan S2), dll. Kesemua peningkatan pelayanan pendidikan dapat diperlihatkan pada tabel 2.6. berikut di bawah ini.

Tabel 2.6. Perkembangan Pelayanan Pendidikan

No	Indikator Pelayanan Indikator	Satuan	2011	2012	2013
1	Sarana dan prasana pendidikan dasar				
	- Jumlah SD/MI	Unit	1,297	1,297	1.295
	- Jumlah SLTP/MTs	Buah	383	391	441
2	Ratio Siswa : Ruang Kelas				
	- SD/MI	%	26.9	25,01	22.52
	- SLTP/MTs	%	32.96	33,73	40.28
3	Daya tampung SMA,SMK dan MA				
	- Jumlah SMA	buah	41	41	45
	- Jumlah SMK	buah	77	94	95
	- Jumlah MA	buah	64	64	73
4	Tingkat pendidikan guru				
	jumlah guru berkualifikasi S1	orang	15,827	15,926	13.439
	jumlah guru berkualifikasi S2	orang	183	386	784

Sumber :BPS Kabupaten Tasikmalaya 2013

5	Meningkatnya jumlah guru yang tersertifikasi				
	guru TK	%	13.3	15.2	23.69
	guru SD	%	48.6	48	56.70
	guru SMP	%	32.4	46.3	44.13
	guru SMA	%	44.2	76.4	51.74
	guru SMK	%	5.6	16.9	12.40

Upaya Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, terkait erat dengan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar serta ketersediaan tenaga kesehatan. Salah satu faktor yang menyebabkan masih rendahnya pencapaian indikator kesehatan adalah masih rendahnya pemenuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan, serta masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di bidang kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2011-2103 makin meningkat diantaranya dari cakupan pemeriksaan ibu hamil (K4), cakupan bumil risti/komplikasi tertangani dan cakupan bayi diimunisasi campak. Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan hal penting yang harus dipenuhi adalah ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dasar antara lain jumlah Puskesmas pada tahun 2013 berjumlah 40 unit dengan rasio 1 (satu) unit Puskesmas per 46.504 penduduk (Standar 1 per 30.000 penduduk) idealnya Kabupaten Tasikmalaya memiliki 62 Puskesmas, tetapi

kurangnya jumlah Puskesmas dapat ditutupi dengan ada dan tersebarnya Puskesmas Pembantu sebanyak 151 unit, Puskesmas Keliling 50 unit, Polindes 223 unit serta Praktek Swasta BP 50 dan Rumah Bersalin 2 unit, (*Sumber Profil Dinas Kesehatan tahun 2012*), dalam rangka penyelamatan ibu dan anak telah dilaksanakan pengembangan pelayanan kegawat-daruratan kebidanan dan bayi baru lahir melalui puskesmas yang mampu melaksanakan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergency Dasar (PONED). Pada Tahun 2012 Jumlah Puskesmas PONED adalah 10 buah (Standar Puskesmas PONED adalah 1/50.000 penduduk) berarti Kabupaten Tasikmalaya membutuhkan sekitar 37 Puskesmas mampu PONED. Kondisi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan di Kabupaten Tasikmalaya secara kuantitas tidak mencukupi yaitu dengan adanya 1 RSUD dan 15 PUSKESMAS DTP. Secara statistik kondisi pelayanan kesehatan dapat diperlihatkan melalui tabel 2.8. berikut ini.

Tabel 2.7. Perkembangan Pelayanan Kesehatan

NO	Indikator Pelayanan	Satuan	2011	2012	2013
A.	Pengembangan Lingkungan Sehat				
1	Meningkatnya persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan	%	61.77	63,20	64.54
2	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	%	62.73	64,13	65.32

NO	Indikator Pelayanan	Satuan	2011	2012	2013
3	Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	%	43.89	46,40	51.36
4	Jumlah desa yang melaksanakan sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	54	69	82
5	Meningkatnya Rumah Tangga Sehat (RT ber-PHBS)	%	44.5	44,5	46.6
B.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular				
1	Meningkatnya Cakupan desa UCI Universal Child Immunization (UCI)	%	82.05	91,74	92
2	Meningkatnya Cakupan Campak	%	93.87	95,20	92.4
3	Meningkatnya cakupan balita dengan pneumonia ditangani	%	100	100	100
C	Perbaikan Gizi Masyarakat				
1	Meningkatnya persentase balita naik timbangannya (N/D)	%	82.12	80,14	73.78
2	Meningkatnya persentase partisipasi masyarakat (D/S)	%	84.44	81,62	80.16
3	Menurunnya persentase balita BGM (KEP Gizi)	%	3.6	5,16	0.67

NO	Indikator Pelayanan	Satuan	2011	2012	2013
4	Meningkatnya persentase balita yang mendapat kapsul Vitamin A 2 kali/tahun	%	91.59	93,18	93.31
5	Balita (6-24 bulan) BGM Gakin dapat MP ASI	%	29.56	73,53	77.90
6	Menurunnya prevalensi balita gizi buruk	%	0.87	0,51	0.13
E.	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin				
1	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di Puskesmas dan jaringannya	%	8	8,4	5.08
2	Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan	%	83.54	86,68	82.44
3	Meningkatnya pelayanan kesehatan antenatal (K4)	%	75.17	84,45	77.91
4	Meningkatnya cakupan Kunjungan Bayi 0-28 hari Neonatal (N2)	%	87.76	88,86	86.25
5	Meningkatnya cakupan bayi baru lahir/neonatus risti/komplikasi tertangani	%	67.5	27,83	84.31
6	Cakupan ibu hamil resiko tinggi/komplikasi tertangani	%	75.96	81,82	82.66

Sumber :BPS Kabupaten Tasikmalaya 2013

3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya

1. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Perdesaan.
2. Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk.
3. Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun dan Rintisan Wajar Dikdas 12 Tahun.
4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.
5. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan
6. Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.
7. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa.
8. Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Berkelanjutan.
9. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/Perkotaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Permukiman.
10. Peningkatan Ketersediaan Pelayanan Prasarana dan Sarana untuk Mendukung Proses Produksi Pertanian serta Mensinergitaskan Usaha Agribisnis dari Hulu sampai Hilir.
11. Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.
12. Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah.

13. Penanggulangan Bencana Daerah.

14. Peningkatan kualitas lembaga pendidikan keagamaan dan peningkatan peran lembaga keagamaan dalam kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat.

B. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tasikmalaya

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

a) Tugas dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tasikmalaya merupakan instansi pemerintah yang turut berperan serta dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya. BAPPEDA adalah salah satu lembaga teknis di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya. Badan ini memiliki tugas pokok dan fungsi membantu menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya serta penilaian atas pelaksanaannya dan berkewajiban memadukan antara rencana nasional dan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya serta Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas unit di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan

penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAPPEDA mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang perencanaan umum pembangunan daerah meliputi perencanaan pembangunan fisik, perekonomian, sosial dan pemerintahan, statistik dan pelaporan serta tugas lain yang diberikan Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dijelaskan diatas, BAPPEDA mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis perencanaan umum pembangunan daerah.
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan meliputi perencanaan fisik, perencanaan perekonomian, perencanaan sosial dan pemerintahan serta statistik untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan pembangunan fisik, perekonomian, sosial dan pemerintahan serta statistik untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

4. Penyelenggaraan administrasi dan penatausahaan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

b) Struktur Organisasi

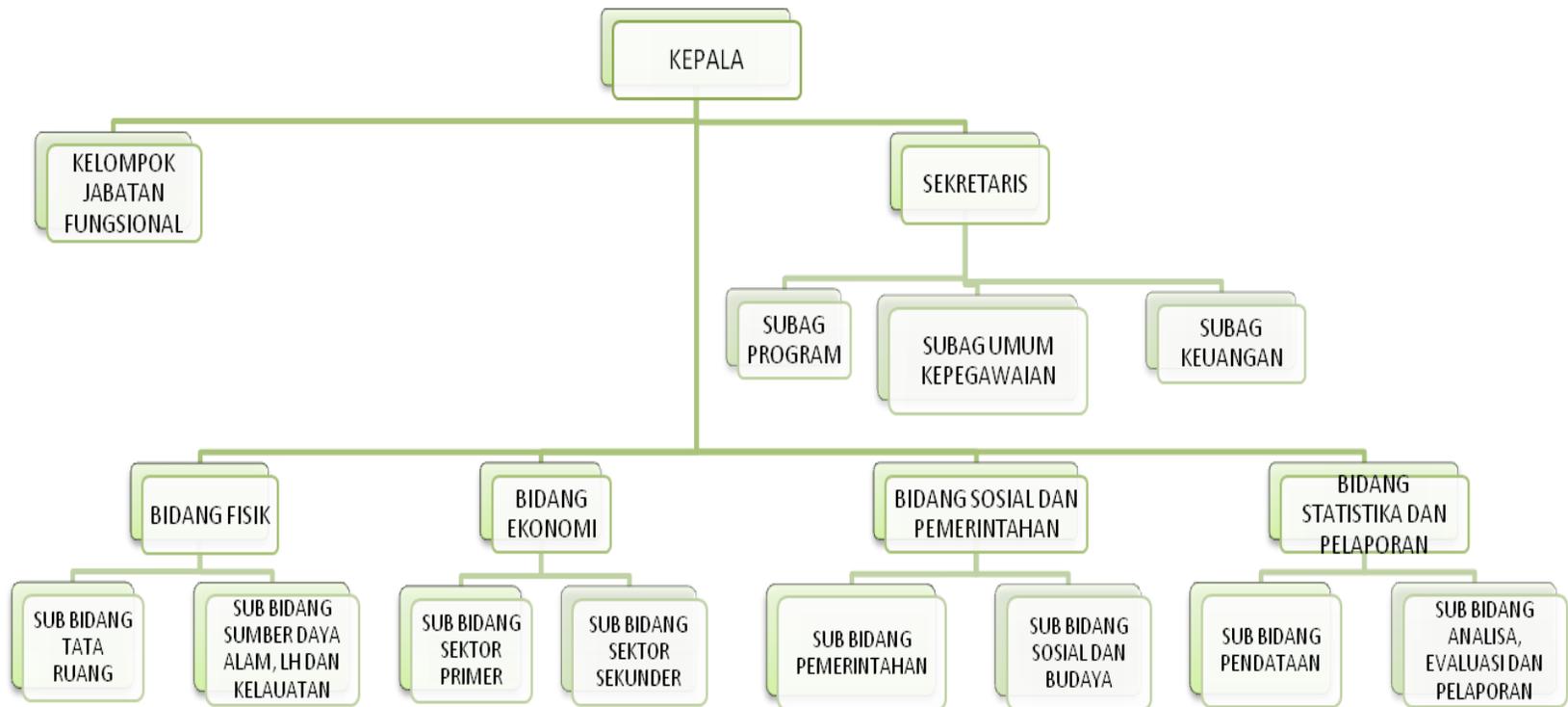
BAPPEDA sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Fisik, membawahi :
 - a. Sub Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kelautan.

4. Bidang Ekonomi, membawahi :
 - a. Sub Bidang Sektor Primer;
 - b. Sub Bidang Sektor Sekunder.
5. Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Sosial dan Budaya.
6. Bidang Statistik dan Pelaporan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pendataan;
 - b. Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Gambar 2.2.
Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya



Penjelasan Struktur Organisasi BAPPEDA :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pokok Badan meliputi urusan kesekretariatan, perencanaan pembangunan fisik, ekonomi, sosial dan pemerintahan serta statistik dan pelaporan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan program, keuangan, kepegawaian dan umum.

Sekretariat membawahi :

- a) Sub Bagian Program;
- b) Sub Bagian Keuangan;
- c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Fisik

Bidang Fisik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan, pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah sumber daya alam, lingkungan hidup, kelautan serta infra struktur wilayah.

Bidang Fisik membawahi :

- a) Sub Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur wilayah;
- b) Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kelautan.

4. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan, pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan yang meliputi pertanian, industri, perdagangan dan koperasi, keuangan daerah, pengembangan usaha serta kehutanan dan perkebunan.

Bidang Ekonomi, membawahi :

- a) Sub Bidang Sektor Primer
- b) Sub Bidang Sektor Sekunder

5. Bidang Sosial dan Pemerintahan

Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan, pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan yang meliputi sosial, budaya, pariwisata, pemerintahan, pendidikan, agama dan kesejahteraan rakyat.

Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahi :

- a) Sub Bidang Pemerintahan;
- b) Sub Bidang Sosial dan Budaya

6. Bidang Statistik dan Pelaporan

Bidang Statistik dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penganalisaan, penyusunan statistik, pengumpulan dan pengolahan data hasil monitoring dan evaluasi serta pendokumentasian dan pelaporan yang berhubungan dengan kegiatan Badan.

Bidang Statistik dan Pelaporan membawahi :

- a) Sub Bidang Pendataan;
- b) Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Peraturan Bupati, mengenai uraian tugasnya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, dibutuhkan adanya Pegawai Negeri Sipil dengan mutu profesionalisme yang memadai, berdayaguna dan berhasilguna didalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Pegawai Negeri Sipil perlu dibina dengan sebaik-baiknya atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja.

Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam

organisasi Pemerintah. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

2. Sumber Daya BAPPEDA

a. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Tabel 2.8. Rekapitulasi Pegawai BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	-	1
2	Sekretariat	16	8	24
3	Bidang Fisik	8	3	11
4	Bidang Ekonomi	9	1	10
5	Bidang Sosial dan Pemerintahan	8	4	12
6	Bidang Statistik dan Pelaporan	8	3	11
7	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-
Jumlah Total		50	19	69

Sumber : Data Kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011

**Tabel 2.9 Rekapitulasi Pegawai BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2011**

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	TINGKAT PENDIDIKAN		
			<S1	S1	S2
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	-	-	1
2	Sekretariat	24	12	8	4
3	Bidang Fisik	11	2	6	3
4	Bidang Ekonomi	10	-	6	4
5	Bidang Sosial dan Pemerintahan	12	2	8	2
6	Bidang Statistik dan Pelaporan	11	3	6	2
Jumlah Total		69	19	34	16

Sumber : Data Kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011